

DEKLARASI

„INDONESIA KELUAR DARI P.B.B."

DEPARTEMEN PENERANGAN R.I.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PENERBITAN CHUSUS
359

DEKLARASI
„INDONESIA KELUAR DARI P.B.B."

OLEH

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

TIDAK UNTUK DIDJUAL-BELIKAN

DEPARTEMEN PENERANGAN R.I.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

DEKLARASI „INDONESIA KELUAR DARI P.B.B."

Keluarnja Republik Indonesia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti jang dikomandokan oleh Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia pada tanggal 7 Djanuari 1965 dalam rapat umum Anti Pangkalan-pangkalan Militer Asing dan meningkatkan Dwikora di Djakarta, adalah sesungguhnja kehendak Rakjat sendiri jang tidak dapat dipisahkan dari perdjuangan Rakjat Indonesia mengganjang projek neo-kolonialisme „Malaysia" dan perdjuangan Rakjat-rakjat sedunia dalam rangka NEFO melawan OLDEFO.

Komando Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia itu mempunjai arti jang sangat penting bagi perkuatan ketahanan Revolusi Indonesia, bagi pelaksanaan prinsip berdiri diatas kaki sendiri, bagi penggalangan persatuan nasional progresif revolusioner berporoskan NASAKOM, untuk memenangkan Revolusi Indonesia dan sekaligus untuk mentjegah penggunaan saluran-saluran PBB oleh kaum imperialis merongrong Revolusi Indonesia. Djuga djelas komando itu mempunjai arti penting bagi perkuatan perdjuangan Rakjat-rakjat sedunia melawan nekolim dengan segala manipulasinja melalui PBB.

Keluarnja Republik Indonesia dari Perserikatan Bangsa-bangsa bukanlah sesuatu keputusan jang diambil setjara tergesa-gesa, tetapi didasarkan atas penelitian sedjarah perkembangannja dan pertimbangan jang matang, terutama sesudah mengalami setjara langsung sikap-sikap buruk jang didjalankan oleh PBB sedjak lahirnja sampai sekarang, bukan sadja terhadap Indonesia tetapi djuga terhadap negara-negara lain, baik jang anggota maupun jang bukan anggota PBB. Keputusan itu adalah sesuai pula dengan prinsip jang diutjapkan oleh Presiden Sukarno dalam rapat umum tanggal 31 Desember 1964 dan rapat umum tanggal 7 Djanuari 1965 di Djakarta, jaitu bahwa „mahkota daripada kemerdekaan bukanlah membership UNO",

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

apalagi PBB dalam wudjudnja seperti sekarang, dan bahwa „mahkota kemerdekaan adalah berdiri diatas kaki sendiri".

Bahwa dalam pidato Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia jang berdjudul „Membangun Dunia Kembali" dalam tahun 1960 sudah dikatakan bahwa „organisasi dan keanggotaan Dewan Keamanan mentjerminkan peta ekonomi, militer dan kekuatan daripada dunia tahun 1945", membuktikan sudah lama Indonesia tidak puas terhadap PBB dan pidato itu merupakan satu tjanang jang djelas tentang tidak representatifnja badan jang dianggap terpenting itu. Ketidak-representatifnja badan itu ditambah lagi dengan dimasukkannja „Malaysia" sebagai anggota Dewan Keamanan, membuktikan lagi bahwa PBB bukan sadja tidak representatif, tapi djuga terang-terangan membela imperialisme, lagi pula hal itu terang-terangan bertentangan dengan pasal 23 dari Piagam PBB, bab Dewan Keamanan, jang mengatakan bahwa „Madjelis Umum memilih enam anggota PBB tidak tetap DK dengan pertama-tama mempertimbangkan sumbangan-sumbangan jang telah diberikan anggota-anggota PBB dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional .....". Dalam hal „Malaysia" ini kaum imperialis telah melakukan manipulasi jang kasar, karena „Malaysia" djelas-djelas merupakan disputed area.

Dalam hubungan ini perlu dikemukakan, bahwa „Malaysia" bukan memberikan sumbangan kepada perdamaian dan keamanan di Asia Tenggara, tetapi sebaliknja. Seperti dikatakan oleh Bung Karno, „Malaysia" itu sebenarnja adalah pangkalan militer asing „....." adalah terutama sekali untuk meng-contain Revolusi Indonesia". Djadi, didjadikannja „Malaysia" anggota DK PBB sebagai hasil manipulasi kaum imperialis, djuga harus diartikan untuk meng-contain Revolusi Indonesia.

Keputusan keluarnja Indonesia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah hasil dari pengalaman-pengalaman Republik Indonesia dan Rakjat Indonesia sedjak berdirinja badan itu dalam tahun 1945 jang sudah tidak representatif diwaktu itu.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Keputusan itu diambil untuk mendorong lebih tjepat berhasilnja Revolusi Indonesia dan mendorong berkembangnja Revolusi-revolusi Rakjat-rakjat didunia, untuk lebih tjepatnja Rakjat-rakjat berhasil Membangun Dunia Kembali.

PBB didirikan pada tahun 1945. Rakjat Indonesia, sebagaimana Rakjat-rakjat sedunia lainnja, pernah menaruh harapan-harapan baik terhadap PBB jang mentjantumkan dalam asas dan tudjuannja antara lain „memelihara perdamaian dan keamanan internasional" dan „memadjukan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa".

Sedjak tahun 1945 Rakjat Indonesia telah banjak berkenalan langsung dengan Organisasi internasional ini, melalui apa jang dinamakan Komisi Tiga Negara, jang dalam kenjataannja selalu mempraktekkan pengabdiannja kepada imperialis.

Adalah karena permainan djahat apa jang dinamakan Komisi Djasa-djasa Baik PBB, maka Irian Barat dalam perdjandjian KMB telah dipisahkan dari Republik Indonesia. Hanja dengan perdjuangan Rakjat Indonesia jang gagah berani dan dengan pengorbanan jang besar, dalam waktu jang lama dan dengan pertjaja kepada kekuatannja sendiri, Irian Barat berhasil dikembalikan kepangkuan Ibu Pertiwi.

Selama perdjuangan untuk pembebasan Irian Barat ini, PBB tidak pernah berada difihak Indonesia, tetapi selalu menjokong kaum imperialis Belanda. Perdjuangan inipun tidak luput dari rongrongan PBB dengan mentjantumkan apa jang dinamakan „plebisit" di Irian Barat. Perdjuangan Rakjat Indonesia, sesuai dengan jang sering dikemukakan oleh Bung Karno, jalah bahwa „pertempuran untuk membebaskan Irian Barat bukan ditentukan di PBB atau New York, tetapi dibumi Indonesia sendiri, dan diatas kaki sendiri".

Perdjuangan Rakjat Indonesia dalam membela dan menegakkan Republik Proklamasi, telah banjak memberikan peladjaran-peladjaran bahwa PBB tidak mau berbuat apapun jang menguntungkan Indonesia dalam melawan subversi, intervensi dan agresi kaum imperialis terhadap Republik Indonesia. Pemberon-

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

takan kontra-revolusi terhadap Republik Proklamasi jang dilakukan oleh Andi Azis, Soumokil, PRRI/Permesta dan DI/TII, ternjata mendapat sokongan dan dropping sendjata dari basis-basis militer imperialis jang menentukan pollicy PBB jang berada disekitar wilajah Indonesia. Intervensi-intervensi ini djustru terdjadi diudjung hidung PBB.

Untuk penjelesaian masalah projek neo-kolonialis „Malaysia" setjara damai, berbagai usaha telah ditempuh Indonesia dengan lahirnja „Manila — Agreement". Melalui manpulasi Michelmore jang kemudian dibenarkan oleh Sekdjen PBB U Thant, „Malaysia" telah dilegalisasi oleh PBB. Inilah salah-satu sumber berlarut-larutnja penjelesaian masalah „Malaysia". Bahkan PBB telah menaikkan „negara" boneka „Malaysia" ini sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Tindakan ini merupakan suatu provokasi dan permusuhan jang terang-terangan terhadap Indonesia, jang tidak mungkin dibiarkan oleh suatu negara jang punja harga diri.

Apakah kedjahatan-kedjahatan PBB ini hanja dilakukan terhadap Indonesia sadja ? Tidak ! Pandji-pandji PBB telah berlumuran darah dimana-mana: Pembentukan Israel dengan djalan memetjah Palestina jang berakibat pengusiran bangsa Arab (Muslim dan Kristen) dari Palestina; agresi terhadap Korea telah mengakibatkan pendudukan Korea Selatan sampai sekarang; dengan menggunakan „pasukan PBB" kaum imperialis telah menggulingkan pemerintah sah Konggo dan membunuh patriot Konggo Patrice Lumumba. Dan setelah ditariknja „pasukan PBB" dari Konggo imperialis Belgia dan AS melakukan agresi terhadap Rakjat Konggo dengan dalih „perikemanusiaan" tanpa ada hukuman dari PBB, dengan mengirimkan „pasukan pemeliharaan perdamaian PBB-nja"; situasi Siprus malahan mendjadi lebih gawat dan sangat merugikan Rakjat Siprus; Republik Kuba sebagai salah satu anggota PBB jang mengalami blokade militer dan ekonomi Amerika Serikat sedjak tahun 1962, samasekali tidak dibela oleh PBB ; lewat PBB kaum Imperialis sedjak tahun 1957 sampai 1962 tidak henti-hentinja

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

mentjoba memasukkan apa jang dinamakan „masalah Hongaria" kedalam agenda Madjelis Umum PBB. Ini adalah intervensi kasar terhadap masalah-masalah dalam negeri Hongaria dan fitnahan terhadap negara-negara Sosialis; dengan melanggar Persetudjuan-persetudjuan Djenewa dan mentjoba menggunakan PBB untuk menggantikan Konperensi Djenewa, AS telah memperhebat intervensi dan agresinja terhadap Rakjat-rakjat Laos, Kambodja dan Vietnam; dengan menggunakan Dewan Keamanan PBB ditjobanja mensahkan serangan-serangannja terhadap Republik Demokrasi Vietnam dan Kambodja. Adalah merupakan kenjataan bahwa PBB tidak mampu menjelesaikan masalah-masalah penting seperti masalah Kashmir, masalah perlutjutan sendjata, dekolonisasi, apartheid, rasdiskriminasi dan lain-lain.

Tahun demi tahun klik Tjiang Kai-sjek jang tidak mewakili siapapun di PBB dipertahankan, sehingga akibatnja RRT jang mewakili 650 djuta Rakjat Tiongkok dirampas haknja jang sah. Dengan majoriteit mekanis, PBB telah mensahkan „embargo" terhadap RRT.

Dengan keluarnja Republik Indonesia dari PBB, maka hampir seribu djuta manusia sekarang berada diluar PBB.

Usaha-usaha Republik Indonesia untuk meretool PBB sesuai dengan kehendak Nefo, demikian pula untuk mengadakan perobahan-perobahan dalam Piagam PBB tidak pernah berhasil sampai sekarang bahkan diperhatikan pun tidak. Selandjutnja PBB dengan njata-njata tidak lagi mentjerminkan keadaan dunia dewasa ini.

Rentetan fakta-fakta diatas adalah bukti hidup jang tak terbantah oleh siapapun bahwa PBB telah merosot mendjadi alat kaum nekolim jang samasekali tidak bisa diharapkan untuk membela kepentingan negara-negara jang baru berkembang terutama di Afrika-Asia.

Sementara kalangan imperialis menghembus-hembus fitnahan seakan-akan keluarnja Republik Indonesia dari PBB mempunjai latar belakang jang sama dengan keluarnja Djerman

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Hitler, Italia Musolini dan Djepang Tojo dari Liga Bangsa-Bangsa, jaitu seolah-olah kita mempunjai maksud mengagresi „Malaysia". Tetapi setiap orang jang berfikiran sehat mengerti bahwa oleh kaum imperialis kini dilakukan konsentrasi dari "the largest noval forse in any part of the world", dan bahwa ini adalah konsentrasi jang "unprecedented since the Japanese War" oleh kaum imperialis Inggeris. Disamping itu umum mengetahui djuga adanja konsentrasi militer AS di Asia Tenggara dengan Armada ke-7-nja, kapal perang nuklir Polaris dipantai Asia Timur, pemuatan 250.000 pasukannja seperti jang ditjanangkan oleh Presiden Sukarno dalam pidato Tavip jang semuanja merupakn pistol jang ditodongkan kepada Indonesia.

Terhadap antjaman kaum imperialis ini Rakjat Indonesia tidak gentar, karena abad keduapuluh bukanlah lagi adanja "gunboat diplomacy" melainkan diplomasinja Rakjat, berani bervivere pericolosa mente.

Melihat situasi diatas, hendaknja dunia Nefo menjadari kegawatan di Asia Tenggara ini dan memahami sikap Indonesia keluar dari PBB serta membenarkannja dan bukan menjajangkannja atau menjesalkannja.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Dewan Pertimbangan Agung memutuskan dengan mufakat bulat :

Demi perdjoangan melawan imperialisme dan demi kehormatan nasional Indonesia, mendukung sepenuhnja kebidjaksanaan dan keputusan Presiden Sukarno jang mengomandokan Indonesia keluar dari PBB dan dari semua lembaganja untuk mendorong dimulainja satu kerdja-sama internasional type baru.

Menjampaikan terima kasih sebesar-besarnja kepada semua negara dan Rakjat penjokong Indonesia jang telah membenarkan sikap adil dan patriotik dari Presiden Sukarno dan Rakjat Indonesia.

Menjerukan kepada negara-negara A-A dan Nefo untuk diatas segala-galanja memperkuat persatuan dan solidaritet kekuatan-kekuatannja sebagai satu-satunja sendjata ampuh

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

dalam perdjuangan mereka melawan nekolim baik didalam maupun diluar PBB.

Menjerukan kepada negara-negara A-A untuk mensukseskan Konferensi A-A II atas dasar semangat Bandung dan prinsip-prinsip berdaulat dibidang politik, berdiri diatas kaki sendiri dibidang ekonomi dan berkepribadian dibidang kebudajaan.

Menjerukan kepada negara-negara NEFO untuk segera mempersiapkan Ganefo sebagai suatu forum jang dapat membentuk satu front internasional anti-nekolim jang perkasa jang benar-benar dapat mendjamin perdjuangan bangsa-bangsa dan Rakjat-rakjat sedunia untuk membangun Dunia Baru jang bersih dari nekolim dan tanpa penghisapan manusia oleh manusia dan bangsa oleh bangsa.

Dalam menghadapi provokasi dan persiapan agresi Inggeris dan AS dengan melakukan pemusatan puluhan ribu pasukan dan puluhan kapal perang diwilajah sekeliling Indonesia, adalah wadjar bagi Rakjat Indonesia terutama Sokoguru Revolusi, jakni buruh dan tani untuk bersama-sama dengan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia jang gagah perkasa, menjatakan kesediaannja mengangkat sendjata membela kedaulatan Negara dan Tanah-Air Indonesia.

Djakarta, 19 Djanuari 1965

Presiden/Ketua Dewan Pertimbangan Agung

SUKARNO

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



R .

P.N. PERTJETAKAN NEGARA R.I. — DJAKARTA — 338/B — '65 (25.000 bk P.C. 359)